

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kasus perkosaan sangat sering terjadi di Indonesia, motifnya berbagai macam yaitu dengan cara diculik, diancam, dirayu, dibius, atau bahkan dibunuh. Kasus ini menyerang bukan hanya perempuan dewasa tetapi juga menyerang anak-anak di bawah umur, karena anak-anak lebih rentan atau gampang diperdaya. Misalnya dengan cara dirayu seperti diberi barang-barang yang mereka sukai, pasti mereka akan menuruti kemauan sang pelaku. Seperti kasus di Jakarta Barat seorang duda memperkosa anak berusia 8 tahun dengan di iming-iming bermain game di ponsel, karena anak tersebut asyik bermain ponsel lelaki tersebut langsung melancarkan aksi kejahatannya tersebut. Dan bahkan ada kasus seorang anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, juga masih banyak contoh kasus yang lain.

Mengapa di Indonesia masih sering terjadi kasus perkosaan, padahal telah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 281 sampai dengan 296 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pada pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia

di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”¹.

Faktor yang menyebabkan kasus ini sering terjadi adalah karena korban tidak berani melaporkan apa yang telah terjadi pada dirinya, oleh sebab itu tidak ada efek jera bagi pelaku. Tetapi faktor korban tidak ingin melaporkan adalah malu aibnya akan terungkap ke masyarakat luas, dan juga takut kepada pelaku, atau bahkan trauma karena harus mengingat kejadian tersebut kembali. Akibat dari perkosaan sangatlah bahaya, salah satunya adalah kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban juga trauma yang sangat mendalam. Kehamilan yang tidak dikehendaki korban ini akan membuat korban merasa malu dan psikologisnya akan terganggu. Sehingga korban akan melakukan aborsi atau membunuh janin yang ada di kandungannya. Terutama anak-anak yang pikiran dan emosinya masih tidak terkontrol. Contoh pada kasus di Jambi, seorang anak yang berinisial WA diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri, sehingga mengakibatkan WA hamil, dan ia baru mengetahui dia hamil saat usia kandungannya sudah mencapai 6 bulan. Akhirnya tanpa berpikir panjang dia menggugurkan kandungannya karena merasa malu dan takut akan aibnya ini. Tetapi dalam vonis hakim dia terbukti bersalah karena telah membunuh janin di dalam kandungannya, dia dihukum 6 (enam) bulan penjara². Dari kasus tersebut faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan

¹Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²<https://www.voaindonesia.com/a/vonis-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungan-di-jambi-dikritik-tajam/4493385.html> diakses pada tanggal 10 April 2019

keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Ketidak mauan korban melapor seringkali karena stigma yang dilekatkan kepada korban seperti “perempuan nakal”, mengandung anak haram. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi di mata masyarakat³. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis. Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami. Menurut ketua MUI " korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilannya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan

³https://www.vice.com/id_id/topic/diskriminasi-gender diakses pada tanggal 10 April 2019

karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya"⁴.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditengaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Banyak juga Undang-Undang yang telah mengatur tentang hak-hak dan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dalam pasal 1, 3 ayat (1), dan 9 ayat (2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan masih banyak lagi. Dengan uraian di atas terlihat bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya peninjauan atas hak-hak dan perlindungan anak, dimulai dari azas kedua deklarasi hak anak-anak yang berbunyi: “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan

⁴ <https://www.antaranews.com/berita/45955/mui-korban-perkosaan-boleh-aborsi> diakses pada tanggal 15 April 2019

sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.”⁵

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunnya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana. Namun, dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi pada hal-hal tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi *provokatus medikalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus *provokatus criminalis*.

Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban perkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asai manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Demikian juga di dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis, menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah termuat dengan jelas mengenai

⁵ Dr. Wagiaty Soetodjo, S.H.,M.S, “*Hukum Pidana Anak*”, PT. Refika Aditama, 2006, Bandung, hal. 67-69

legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan yaitu Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁶

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346 KUHP yang berbunyi “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, pasal 347 KUHP berbunyi “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun., pasal 348 KUHP “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

⁶Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

tahun enam bulan.(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Juga pasal 349 KUHP “Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”⁷, selain itu juga diatur dalam Pasal 299 KUHP. Tetapi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara khusus mengatur tentang pengecualian larangan aborsi.

Dari uraian tersebut di atas saya mengambil judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak secara hukum terkait dengan status sebagai korban tindak pidana perkosaan dan status sebagai pelaku aborsi?
2. Bagaimana kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi di Indonesia?

⁷Pasal 347,348,349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai untuk pemecahann atas masalah yang diteliti. Tujuan Penulisan ini diperlukan karena berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan untuk memberikan arah yang tepat dalam penulisan agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Adapun tujuan penulisan ini dibuat adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan kedudukan anak secara hukum terkait dengan status sebagai korban tindak pidana perkosaan dan status sebagai pelaku aborsi
2. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi

D. Manfaat Penulisan

Penulisan yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan bukan hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari dibuatnya penulian ini adalah :

1. Mengetahui, mehami, dan dapat menjelaskan kedudukan anak secara hukum terkait dengan status sebagai korban tindak pidana perkosaan dan status sebagai pelaku aborsi.
2. Mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan pidana aborsi di Indonesia

E. Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memberikan kebenaran dari penulis, maka diperlukan metode penulisan yang tepat, karena hal itu sangat penting dalam penulisan skripsi ini karena sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa terhadap data-data untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Metode dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penulisan skripsi ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi sumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi.
- 2) Majalah-majalah, dokumen, jurnal hukum, serta artikel yang berkaitan dengan proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi.

c. Bahan Hukum Tersier (non hukum) merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, serta kamus lain yang masih relevan.

3. Cara Memperoleh Data

Metode Pengumpulan Data Library Research (penelitian kepustakaan). Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau

artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal dengan analisis *Viktimologis*. Yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap korban atau teori-teori mengenai korban.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1) BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi penulisan.

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang berguna untuk menunjang dan mendukung penulisan skripsi ini, adapun tinjauan pustaka tersebut terdiri dari: tinjauan umum tentang perlindungan hukum seperti pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum terhadap anak, tinjauan umum tentang anak seperti pengertian anak, hak-hak anak, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, tinjauan umum tentang tindak pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, teori-

teori di dalam hukum pidana, tindak pidana perkosaan, pengertian perkosaan, penyebab terjadinya perkosaan, dampak terjadinya perkosaan, tindak pidana aborsi, pengertian aborsi, penyebab terjadinya aborsi, dampak terjadinya aborsi, aborsi menurut undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

3) BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan mengenai kedudukan anak terkait dengan statusnya sebagai korban tindak pidana perkosaan dan pelaku aborsi, juga mengenai kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

4) BAB IV: PENUTUP

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari garis-garis besar pokok pembahasan.

